

**Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja  
Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Makassar**

**TESIS**

Diajukan Oleh

Lira Pappa

NIM : 4621104050



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PELAKSANAAN  
ANGGARAN BELANJA DI BADAN PENGELOLALAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

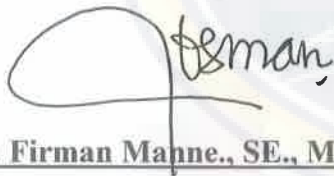
**LIRA PAPPA**

**NIM : 4621104050**

Menyetujui

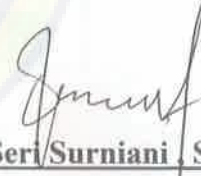
Komisi Pembimbing

**Pembimbing I**



Dr. Firman Manne., SE., M.Si, Ak. CA

**Pembimbing II**



Dr. Seri Surniani, S.E., M.Si

**Mengetahui :**

**Direktur Pps Universitas Bosowa**

  
Prof. Dr. Ir. H.A. Muhibuddin, M.Si

**Ketua Program Studi Manajemen**

  
Dr. Ir. Lukman S, S.Si., S.Psi., SE., MM, IPU


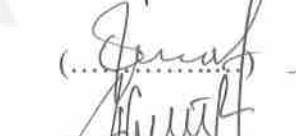


## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023  
Judul Tesis : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Lira Pappa  
NIM : 46 21 104 050

Telah diterima oleh PANITIA Ujian Tesis Pascasarjana Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Manajemen.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak. CA  
Sekretaris : Dr. Seri Suriani, S.E., M.Si  
Anggota Penguji: 1. Dr. Hasanuddin Remmang, S.E., M.Si.  
2. Dr. Sukmawati Mardjuni, S.E., M.,Si.

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Makassar, 23 Agustus 2023  
Direktur Pascasarjana



  
Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S  
NIDN. 0005086301

## PERNYATAAN ORISINALISASI TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar Akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia tesis (MAGISTER) di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar. 17 Agustus 2023

Mahasiswa,



**Lira Pappa**

NIM : 4621104050

## PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan proposal tesis. Puji dan syukur saya panjatkan Tuhan yang Maha Esa serta kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman,amin.

Penulisan proposal tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister pada Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah **“Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, S.T.,M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr.Firman Menne,SE.,M.Si.,Ak.CA selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Seri Suriani.S.E.,M.Si selaku pembimbing ke II yang telah meluangkan waktu tenaga serta pikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Ir. Lukman Setiawan, S.Si., S.E.,M.M selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr.Syamsul Bahri, S.Sos.,M.Si selaku Asisten Direktur Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar.
5. Seluruh Bapak/Ibu Penguji dan Dosen Program Studi Magister Manajemen Universitas Bosowa Makassar yang telah menguji dan mengajar serta berbagi ilmu kepada penulis.
6. Kepada seluruh Staf Akademik Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu pengurusan administrasi penulis selama proses perkuliahan.
7. Kepada Pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang telah memberikan izin meneliti, khususnya Kak Yana Panggalo, Ibu Yayu, Pak Marsi,Ibu Cica dan Pak Darmin yang telah membantu saya dalam penelitian dan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tesis.
8. Kepada kedua orang tua ku Bapak Benyamin Rande Pappa dan Ibu Selpi Limbong Lase yang tak henti-hentinya selalu mensupport dan mendoakan

peneliti. Kupersembahkan tesis ini sebagai bentuk rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab peneliti. Semoga tesis ini dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan untuk sejenak melupakan kelelahan dalam mendidik dan menyayangi peneliti.

9. Saudara-saudaraku, atas kasih sayang, doa dan support yang luar biasa sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada rekan kerja serta Pimpinan dan Penyelia BNI Kantor Cabang Utama Mattoangin dan BNI Kantor Kas Sudiang yang selalu memberi ruang dan kesempatan bagi peneliti untuk semangat mengejar dan melanjutkan pendidikan magister.
11. Kepada teman seperjuangan yang selalu saling mensupport serta Kekasih yang selalu memotivasi dan setia menemani peneliti dalam pembuatan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, Oktober 2023

Penulis

**Lira Pappa**  
**4621104050**

## ABSTRAK

**LIRA PAPP**, 4621104050. Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (dibimbing oleh Dr.Firman Menne,SE.,M.Si.,Ak.CA dan Dr.Seri Suriani.S.E.,M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Fokus dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Pengumpulan data menggunakan teknik data sekunder yaitu data yang bersifat kuantitatif, selama lima tahun terakhir dari 2018-2022 yang diperoleh dari dokumen laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dari tahun 2018-2022 bervariasi. Di mana pada tahun 2018 masuk dalam kriteria cukup efektif,tahun 2019, 2020, 2021 masuk kriteria efektif, tahun 2022 masuk dalam kriteria sangat efektif di karenakan ada beberapa belanja yang ter-realisis melebihi yang dianggarkan sehingga realisasi anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan target anggaran belanja. Serta pelaksanaan anggaran belanja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar tahun 2018-2022 secara keseluruhan kurang efisien. Ini dikarenakan pengelolaan anggaran belanja belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

**Kata Kunci:** Laporan Realisasi Anggaran, Efektivitas, Efisiensi.



## **ABSTRACT**

**LIRA PAPP**, 4621104050. *Analysis of the effectiveness and efficiency of budget implementation at the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency (supervised by Dr.Firman Menne,SE.,M.Si.,Ak.CA and Dr.Seri Suriani.S.E.,M. Si).*

*This research aims to determine the effectiveness and efficiency of budget implementation. The effectiveness and efficiency of budget implementation at the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency. The focus of this research is the budget realization report on the effectiveness and efficiency of budget implementation at the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency. Data collection uses secondary data techniques, namely quantitative data, for the last five years from 2018-2022 obtained from report documents on the realization of the income and expenditure budget, the effectiveness and efficiency of the implementation of the expenditure budget at the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency.*

*The research results show that the level or criteria for budget effectiveness in the effectiveness and efficiency of budget implementation at the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency from 2018-2022 varies. Where in 2018 it was included in the criteria of being quite effective, in 2019, 2020, 2021 it was in the criteria of being effective, in 2022 it was in the criteria of being very effective because there were several expenditures that were realized in excess of what was budgeted so that the realization of the expenditure budget was higher than the target expenditure budget. . As well as the implementation of the budget, the effectiveness and efficiency of the implementation of the budget at the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency for 2018-2022 is overall less efficient. This is because budget management has not succeeded in meeting efficiency requirements, namely the use of minimum funds to achieve maximum results.*

**Keyword: Budget realization Report, Effectiveness, Efficiency.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Lingkup Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>9</b>
A. Perspektif Teori .....	9
1. Anggaran Sektor Publik .....	9
2. Pengertian Efektivitas .....	10
3. Pengertian Efisiensi.....	13
4. Pengertian Anggaran .....	18
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	26
6. Kebijakan Penyusunan APBD .....	28

7. Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	33
8. Belanja Barang Dan Jasa .....	34
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Konseptual .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Teknik Pengumpulan Data .....	44
C. Jenis Dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Analisa Data .....	45
E. Definisi Oprasional .....	47
F. Teknik Analisa Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	51
1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Makassar .....	51
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar .....	52
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Makassar .....	54
4. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar .....	55
B. Hasil Penelitian .....	70
C. Pembahasan .....	93

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>96</b>
	A. Kesimpulan.....	96
	B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	.....	<b>101</b>



## DAFTAR TABEL

- Tabel II.1 Kriteria Efektivitas
- Tabel II.2 Kriteria Efisiensi
- Tabel II.3 Penelitian Terdahulu
- Tabel III.2 Kriteria Rasio Efektivitas
- Tabel III.1 Kriteria Rasio Efisiensi
- Tabel IV.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018
- Tabel IV.2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019
- Tabel IV.3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020
- Tabel IV.4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021
- Tabel IV.5 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022
- Tabel IV.6 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo
- Tabel IV.7 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir .....	43
Gambar III.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Makassar .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Pengumpulan Data .....	101
Lampiran Surat Izin Penelitian Dinas PMPTSP Provinsi .....	102
Lampiran Surat Izin Penelitian Dinas PMPTSP Kota.....	103



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan yang paling mendasar dalam pemenuhan kebutuhan program setiap institusi atau unit kegiatan adalah ketersediaan anggaran yang kemudian disalurkan pada setiap sisi program yang disediakan atau program yang direncanakan dengan melalui pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausaha/akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan. Melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa uang atau dana publik telah dibelanjakan secara efisien, dan efektif, dengan demikian susunan pemerintahan dari sistem lama sangat dibutuhkan guna terwujudnya pemerintahan yang dapat dikatakan baik dimana pemerintah pusat yang kuat dalam memutuskan kebijakannya.

Susunan baru ini membutuhkan sistem untuk mengurangi adanya ketergantungan antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan serta mampu mengatur daerah sehingga mereka mampu bersaing baik secara regional, nasional ataupun internasional. Hal ini bertujuan guna memungkinkan daerah mengurus serta mengendalikan urusan pemerintahanya sendiri supaya berguna serta sukses dalam proses penyelenggaraan



pemerintahan dan pembangunan yang berfokus pada kepuasan terhadap masyarakat. Tuntutan lain timbul supaya organisasi pemerintahan mampu mencermati value for money yang menuntut pemerintahan harus bijak didalam pengadaan serta alokasi sumber daya, efisiensi didalam penggunaan sumber daya yang mana berarti pemakaian sebisa mungkin diminimalkan serta hasilnya dioptimalkan, dan efektif dalam arti agar dapat tercapai seluruh tujuan yang telah diharapkan. (Yunina, 2019)

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang, dengan demikian anggaran belanja dikatakan efektif jika anggaran belanja tersebut bisa terserap untuk menjalankan program-program atau kegiatan organisasi. Selain itu anggaran belanja dikatakan efisien jika output atau hasil yang didapatkan dari anggaran belanja tersebut bisa melebihi target dari program atau kegiatan organisasi tersebut (Mardiasmo, 2018).

Efisiensi dan efektivitas dapat digunakan untuk mengamati bagaimana kondisi keuangan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, apakah telah dilaksanakan dengan ekonomis, menguntungkan, serta digunakan dengan sewajarnya dan memenuhi target dan hasil pencapaian tersebut

memiliki kerasionalan terhadap sumber yang digunakan. Organisasi sektor publik dianggap baik apabila pihak yang terlibat bisa melaksanakan seluruh tugasnya yang juga berkaitan terhadap capaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan biaya relatif rendah.

Kewajiban baru sebagai organisasi pemerintahan adalah selalu memperhatikan value for money, bersamaan dengan adanya tuntutan yang diterapkan masyarakat dimana harus selalu mengutamakan tanggung jawabnya terkait dilaksanakannya value for money yang terkait pengadaan serta alokasi sumber daya dengan artian penggunaannya dibuat seminimal mungkin namun dapat menciptakan hasil yang maksimal dengan itu diperlukannya juga laporan keuangan yang bertujuan secara luas guna berperan sebagai laporan keuangan untuk nantinya digunakan sebagai pemenuh kebutuhan pengguna dari laporan dalam rangka pencapaian ini, selanjutnya ditetapkan semua pertimbangan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkaitan dengan penyajian dari laporan keuangan, persyaratan serta susunan laporan keuangan, juga isi dari laporan keuangan (Abarca, 2021) maka hasil dari laporan tersebut terbentuknya realisasi anggaran yang dimana laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, akan merupakan factor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Berikut ini adalah faktor penentuan efektif dan efisien:

1. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana;
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktur maupun fungsional;
3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat. Faktor pimpinan berperan penting dalam mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. (Rondonuwu, 2011).

Fauziah (2018:99) menyatakan laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LPA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diubah menjadi PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggunaan APBN, untuk mendukung percepatan dan modernisasi anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dengan demikian standar Akuntansi Pemerintah mengatur seluruh proses penyajian laporan keuangan yang bertujuan sebagai bentuk peningkatan keterbandingan suatu laporan keuangan kepada anggaran tiap periode ataupun entitas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar terletak pada provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu instansi pemerintahan yang

membantu tugas presiden dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Tentunya dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar menggunakan anggaran belanja dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Pelaksanaan anggaran yang kurang baik akan berdampak terhadap anggaran belanja yang ter hutang. Kecenderungan yang terjadi pada Kabupaten/Kota terkait perencanaan anggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah adanya penyelewengan terhadap dana APBD seperti korupsi dana anggaran, ketimpangan yang terjadi terkait adanya pengeluaran-pengeluaran yang melebihi anggaran, serta adanya pengelembungan (*mark up*) belanja dari belanja wajar dan masih banyak lagi peyimpangan yang mungkin terjadi terkait anggaran pemerintah daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar mengalami beberapa kali perubahan penjabaran APBD TA 2021. Perubahan penjabaran APBD TA 2021 antara lain : Penyesuaian sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (TA 2020), penyesuaian belanja tidak terduga sebagai dampak dari pandemic Covid-19, penyesuaian petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik, reconfusing pendapatan dan belanja daerah sebagai dampak pandemic

covid-19, penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan besaran tambahan penghasilan pegawai, serta refofusing belanja daerah dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlah anggaran pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar sebesar Rp.96.882.000.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp.286.287.428.698,- dengan realisasi sebesar Rp.243.777.152.106.- atau 85,15%. (*sumber LAKIP 2021*)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar?
2. Bagaimana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja di masa yang akan datang khususnya mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

2. Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengendalian anggaran belanja barang pada masa yang akan datang khususnya mengenai pelaksanaan efektivitas dan efisiensi anggaran.
2. Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja.

#### **E. Lingkup Penelitian**

Untuk memfokuskan penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Perspektif Teori**

##### **1. Anggaran Sektor Publik**

Anggaran public berisi rencana kegiatan yang di presentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran ,memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Ulum, 2008:98).

Anggaran negar adalah: “suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode dimasa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi dimasa lalu” (Ulum, 2008:98).

Lebih lanjut Ulum (2008:98) berdasarkan pengertian anggaran negara diatas maka melalui anggaran negara tidak hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode dimasa depan, akan tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang sungguh-sungguh terjadi dimasa lalu. Sehingga, secara lebih terinci dapat pula dinyatakan bahwa



anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah suatu periode dimasa depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut. Di samping mengungkapkan kebijaksanaan pemerintah untuk suatu periode dimasa depan, dari anggaran negara dapat diketahui pula realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dimasa yang lalu. Sehingga melalui anggaran negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dimasa lalu, serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah dimasa yang akan datang.

## **2. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Indra ( 2006 ) menjelaskan bahwa efektivitas adalah keberhasilan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya . Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Atau dengan kata lain Efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Haryanto, dkk (2007) menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan input.

Rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

a. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target target pendapatan sektor publik. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja (Widiyana, 2016):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900- 327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II. 1 Kriteria Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% Ke atas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

b. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat penyerapan Anggaran yang berpengaruh pada efektivitas anggaran sebagai berikut (Heru, 2015):

1) Faktor Perencanaan. Faktor - faktor pembentuk faktor perencanaan adalah:

- a) Anggaran kegiatan diblokir,
- b) SK panitia lelang terlambat ditetapkan,
- c) Terlambat nya jadwal penyusunan lelang,
- d) DIPA perlu di revisi karena tidak sesuai kebutuhan,
- e) Pelaksanaan kegiatan tidak melihat rencana atau jadwal yang tercantum dalam halaman tiga (3) DIPA.

2) Faktor Administrasi. Faktor - faktor pembentuk faktor administrasi adalah:

- a) Salah menentukan akun,
- b) Masa penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu pendek,
- c) Keterbatasan pejabat pengadaan yang bersertifikat,
- d) Kurangnya pemahaman tentang peraturan mengenai mekanisme pembayaran.

3) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor-faktor pembentuk faktor SDM adalah:

- a) SDM pelaksana kurang kompeten,
- b) Rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan,
- c) Ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi,
- d) Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbang nya risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima,
- e) SK penunjukan kegiatan swakelola belum ditetapkan.

4) Faktor Dokumen Pengadaan. Faktor-faktor pembentuk faktor dokumen pengadaan adalah:

- a) Kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS)
- b) Kontrak belum di tanda tangani karena berbagai permasalahan,
- c) Adanya addendum kontrak,
- d) Pejabat pengelola keuangan sering mengalami mutasi.

### **3. Pengertian Efisiensi**

Efisiensi merupakan hal terpenting, karena suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisien cenderung diatas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiennya. Secara absolut, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja organisasi. Namun, berbagai program pada dua organisasi yang berkecimpung dalam industri yang sama dapat diperbandingkan tingkat efisiennya. Apabila hasil rasionya lebih besar dari satu dibandingkan

hasil rasio program yang sama di organisasi lainnya, program tersebut bisa disebut lebih efisien. Karena itu efisien dapat dikembangkan dengan empat cara yaitu:

- a. Dengan menaikkan output untuk input yang sama
- b. Dengan menaikkan output lebih besar dibandingkan proporsi peningkatan input
- c. Dengan menurunkan input untuk output yang sama
- d. Dengan menurunkan input lebih besar dibandingkan proporsi penurunan output.

Dedi dan Ayuningtyas (2010) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Indra (2006) menjelaskan bahwa efisiensi adalah input yang tersedia mampu menghasilkan output pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat.

Haryato, dkk (2007) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang dihasilkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2006) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efisiensi menurut Siagian (1999) yang mengutip pernyataan H.Emerson (1998),

adalah perbandingan yang baik antara input dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan ), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain berhubungan dengan apa yang telah diselesaikan.

Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma dan dengan biaya serendah-rendahnya

Selanjutnya, Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai kondisi ketika tidak mungkin lagi alokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, diartikan setiap belanja pemerintah diartikan setiap belanja yang dilaksanakan pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut dipenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien.

#### a. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan anggaran dapat diukur menggunakan perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Di mana, belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena ini pengukuran efisiensi pelaksanaan belanja dikaitkan dengan seberapa efisien pelaksanaan belanja langsung terhadap total belanja. Semakin efisien sumber daya (input) yaitu realisasi anggaran belanja khususnya anggaran belanja langsung maka semakin efisien pelaksanaan program/ kegiatan (Arisandi, 2018).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel II.2 Kriteria Efisiensi

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% Ke atas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

b. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat penyerapan Anggaran yang berpengaruh pada efektivitas anggaran sebagai berikut (Heru, 2015):

- 1) Faktor Perencanaan. Faktor - faktor pembentuk faktor perencanaan adalah:
  - a) Anggaran kegiatan diblokir,
  - b) SK panitia lelang terlambat ditetapkan,

- c) Terlambat nya jadwal penyusunan lelang,
- d) DIPA perlu di revisi karena tidak sesuai kebutuhan
- e) Pelaksanaan kegiatan tidak melihat rencana atau jadwal yang tercantum dalam halaman tiga (3) DIPA.

2) Faktor Administrasi. Faktor - faktor pembentuk faktor administrasi adalah:

- a) Salah menentukan akun,
- b) Masa penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu pendek,
- c) Keterbatasan pejabat pengadaan yang bersertifikat,
- d) Kurangnya pemahaman tentang peraturan mengenai mekanisme pembayaran.

3) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor-faktor pembentuk faktor SDM adalah:

- a) SDM pelaksana kurang kompeten,
- b) Rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan,
- c) Ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi,
- d) Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbang nya risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima,
- e) SK penunjukan kegiatan swakelola belum ditetapkan.

4) Faktor Dokumen Pengadaan. Faktor-faktor pembentuk faktor dokumen pengadaan adalah:

- a) Kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS),



- b) Kontrak belum di tanda tangani karena berbagai permasalahan,
- c) Adanya addendum kontrak,
- d) Pejabat pengelola keuangan sering mengalami mutasi.

#### **4. Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis, yang dirumuskan dalam bentuk angka-angka, dimana mencerminkan kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan atau instansi. Menurut Lubis (2011 : 226) anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) mendatang.

Menurut Ernawijaya (2015) mengatakan anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang dibuat secara tepat dan cermat berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu satu periode.

Sedangkan Halim dan Kusufi (2016) mengatakan pengertian anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam bentuk moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan periodik melalui pencatatan

dan meringkas data pelaksanaan operasi pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran juga membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang didalam anggaran.

Data dan informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menyusun anggarannya dapat diperoleh dari kegiatan dan kejadian yang terjadi di perusahaan dimasa lalu, masa sekarang, dan harapan-harapan yang ingin dicapai dimasa mendatang (Sasongko,2010 : 2).

#### **a. Karakteristik Anggaran**

Anggaran merupakan rencana manajemen yang mendasarkan asumsi bahwa langkah – langkah positif akan diambil oleh penyusunan anggaran agar realisasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sedangkan perkiraan hanya merupakan prediksi mengenai apa yang terjadi. Mulyadi (2015) mengatakan ada beberapa karakteristik anggaran antara lain :

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.
- 2) Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- 3) Memiliki kecakapan manajemen untuk menjalankan dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam anggaran.

- 4) Proposal anggaran disahkan oleh pihak yang berwenang dalam menetapkan anggaran.
- 5) Setelah disahkan, anggaran hanya dapat direvisi dalam keadaan tertentu.

Dari karakteristik diatas dapat dipahami bahwa anggaran merupakan bagian terpenting untuk manajemen dalam menjalankan pekerjaan. Sebagai instrument dalam mencapai target, anggaran bisa dipercaya karena disusun berdasarkan riset data periode yang lalu dan estimasi tahun yang akan datang.

#### **b. Prinsip-Prinsip Anggaran**

Adapun prinsip-prinsip anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- 2) Komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
- 3) Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.
- 4) *Non discretionary appropriation*, jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

- 5) Periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.
- 6) Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan *ineficiency* anggaran serta dapat memunculkan *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.
- 7) Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan.
- 8) Diketahui publik, anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas.

### c. Syarat Dalam Penyusunan Anggaran

Herison (2015) mengatakan dalam sebuah penyusunan anggaran diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, karena terdapat kemungkinan dalam pelaksanaan anggaran akan mengalami perubahan dan sebagainya, adapun syarat tersebut adalah :

#### 1) Anggaran Realistis

Seharusnya anggaran yang dibuat dilihat dari keadaan harga barang yang dibutuhkan, artinya berdasar terhadap harga yang valid pada saat itu sehingga dapat melakukan rincian terhadap perubahan harga yang akan datang.

#### 2) Anggaran Bersifat Luwes

Anggaran yang dibuat memiliki lingkup dalam melakukan revisi, beradaptasi dengan keadaan yang bisa saja

mengalami perubahan, sehingga anggaran yang dibuat tidak fleksibel.

### 3) Anggaran Yang Sustainable

Anggaran yang disusun membutuhkan perhatian secara terus menerus dan merupakan usaha yang insidental. Dalam penyusunan anggaran perusahaan mempunyai keyakinan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan mengendalikan berbagai relevan variabel dalam mencapai tujuan, untuk melaksanakan sistem manajemen ilmiah, untuk berkomunikasi secara efektif, untuk memberi motivasi kepada anggotanya, untuk mendorong adanya motivasi.

#### **d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran**

Herispon (2015) dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang dapat dibedakan dalam dua faktor yaitu:

##### 1) Faktor Internal

Data informasi dan pengalaman yang diperoleh dari dalam perusahaan tersebut, sehingga faktor ini dapat mempengaruhi perusahaan seperti :

- a) Penjualan tahun lalu (meliputi mutu, jumlah, pasar sasaran, desain dan lainnya).
- b) Perusahaan memiliki kebijakan dalam penetapan harga barang, syarat penjualan dan tujuan distribusi yang tepat.

- c) Kebijakan perusahaan misalnya, dalam penempatan harga jual, syarat penjualan, pemilihan saluran distribusi.
- d) Memiliki kapasitas produksi yang tinggi.
- e) Memiliki tenaga kerja yang berkualitas baik dari segi kuantitas.
- f) Modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

## 2) Faktor eksternal

Data informasi dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tapi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor ini disebut juga faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (un controlable) seperti:

- a) Keadaan persaingan
- b) Pertumbuhan penduduk
- c) Pendapatan/penghasilan masyarakat
- d) Pendidikan masyarakat
- e) Penyebaran penduduk
- f) Agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat
- g) Kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian, politik sosial, budaya dan keamanan
- h) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.

## e. Kegunaan Anggaran

Anggaran yang dibuat atau yang disusun untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan akan memberikan kegunaan atau fungsi, yaitu :

- 1) Anggaran dapat digunakan sebagai sebagai pedoman kerja  
Anggaran yang telah dibuat dijadikan sebagai pedoman, acuan kerja yang harus diikuti kedepan, dan arah serta target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.
- 2) Anggaran dapat digunakan sebagai alat pengkoordinasian kerja Agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan saling bekerja sama dengan baik, saling menunjang agar kelangsungan dan kelancaran jalannya perusahaan terjamin, sehingga akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Anggaran dapat digunakan sebagai alat pengawasan kerja Anggaran yang disusun digunakan sebagai tolak ukur, pembandingan untuk menilai, evaluasi realisasi kegiatan perusahaan, seperti yang dianggarkan dengan kenyataan yang sesungguhnya.

**f. Fungsi anggaran**

Sujarweni (2015) dalam organisasi sektor publik menerapkan sistem anggaran dalam kegiatan operasionalnya, maka dari itu anggaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- 1) Alat perencanaan Anggaran berfungsi sebagai merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang dibutuhkan

rencana sumber pendapatan yang diperoleh organisasi sektor publik.

- 2) Alat pengendalian Anggaran sebagai alat pengendalian ini dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.
- 3) Alat kebijakan fiskal Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijadikan organisasi sektor publik, hal ini akan mempermudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.
- 4) Alat politik Bentuk dokumen politik dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
- 5) Alat koordinasi dan komunikasi Dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja kegiatan seluruh bagian organisasi. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan organisasi.
- 6) Alat penilaian kerja Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilai kinerja. Dimana penilaian kinerja organisasi sektor publik akan di nilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.



7) Alat motivasi Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakan sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.

8) Alat menciptakan ruang publik Keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti birokrat, DPR/MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Beberapa pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir juga akan selalu berusaha untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah. Sedangkan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan pendapat dan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

## **5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

### **a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan dan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Halim (2016) mengatakan Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu anggaran daerah yang berfungsi sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, disuatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyekproyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutup pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **b. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018 :

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- 5) Partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
- 6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## **6. Kebijakan Penyusunan APBD**

Menurut Permendagri No.52 Tahun 2016 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

**a. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

**b. Belanja Daerah**

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- 1) Belanja tidak langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Uang kinerja dan subsidi pimpinan dan anggota DPRD, kompensasi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

b) Belanja Bunga

Digunakan untuk membayar bunga utang yang dihitung sesuai dengan kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang berdasarkan pada kesepakatan pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

c) Belanja Subsidi

Digunakan untuk memberikan bantuan anggaran kepada perusahaan/lembaga tertentu sehingga harga jual barang/jasa yang diproduksi dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah digunakan untuk mengungkapkan pembelian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/persoangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Sedangkan bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e) Belanja Bagi Hasil Pajak

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau

pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Keuangan

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

g) Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak di perkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Belanja langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Penganggaran belanja langsung dalam APBD

Merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan anggaran yang berhubungan dengan gaji/upah dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa merupakan pengadaan barang yang memiliki kegunaannya tidak lebih dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam bentuk jasa.

d) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pembelian aset tetap berwujud/fisik yang memiliki nilai kegunaan lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, seperti pembelian peralatan dan mesin, gedung, tanah, dan bangunan, jalan, pengadaan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

e) Surplus/Defisit APBD

Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih dari anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- a) Penerimaan Pembiayaan
- b) Pengeluaran Pembiayaan
- c) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

#### **7. Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Menurut Halim (2016) mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, yaitu satu tahun.

APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah tingkat II. Oleh karena itu pertanggungjawaban bersifat vertikal. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29



Tahun 2002, APBD terdiri dari tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## **8. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (Pemda) dan belanja perjalanan (Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PKM.02/2018) Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk :

### **a. Belanja barang meliputi :**

- 1) Belanja barang untuk kegiatan operasional, meliputi belanja kebutuhan instansi, belanja pengadaan bahan makan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional satuan kerja, belanja atase pertahanan luar negeri dan barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya;
- 2) Belanja barang untuk kegiatan non operasional, meliputi belanja bahan, belanja barang transit, belanja honor keluar (output) kegiatan, belanja rugi selisih kurs uang persediaan untuk satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia luar negeri dan atase teknis, belanja barang operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, belanja pencairan dana bantuan operasional perguruan

tinggi luar negeri badan hukum, belanja denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, belanja dalam rangka refund dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun anggaran yang direncanakan;

- a). Belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah Millennium Challenge Corporation (MCC);
- b). Belanja kontribusi pada organisasi internasional dan trust fund, serta belanja kontribusi pemerintah berupa dana dukungan kelayakan, fasilitas penyiapan proyek dan ketersediaan layanan

**b. Belanja jasa meliputi**

Belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultasi, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada Badan Layanan Umum (BLU), dan belanja jasa lainnya.

- 1) Belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/ masa manfaat atau kapitalisasi kinerja Aset Tetap (AT) atau aset lainnya, dan atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- 2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

- 3) Belanja barang BLU merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU
- 4) Belanja barang untuk di serahkan kepada masyarakat/Pemda merupakan pengeluaran anggaran belanja Negara untuk pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan belanja bantuan sosial (Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PKM.02/2018).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel III**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Penelitian	Metodologi	Hasil
1	Rusita Untari (2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bahwa dinas pendidikan kota semarang sudah melaksanakan program dan kegiatan dalam belanja langsung dengan hasil yang efektif dengan rata – rata pencapaian dari empat tahun tersebut sebesar 97.74 %. Hasil perhitungan pada tingkat efektivitas pada belanja langsung Dinas Pendidikan

				Kota Semarang setiap tahunnya pencapaiannya berbeda –beda karena dalam setiap tahunnya pencapaian dari masing-masing kegiatan tidak selalu sama meskipun jenis programnya sama dan ada beberapa program yang tidak dijalankan di setiap tahunnya sehingga ada perubahan di pencapaian program tersebut.
2	Siti Basariyah (2015) Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pasca sarjana Universitas Tadulako Palu	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) DaerahProvinsi Sulawesi Tengah	Analisis deskriptif	tahun tingkat efisiensi anggaran belanja BPMPD Daerah Prov.Sulteng berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 tingkat efisiensi sebesar 77,61 % masuk pada kategori efisien namun berturut-turut di tiga tahun berikutnya terjadi penurunan tingkat efisiensi yaitu di tahun 2012 menjadi 84,66%, tahun 2013 menjadi 85,03% dan ditahun 2014 menjadi 89,34% tetapi masih masuk pada kategori cukup efisien
3	Dwi Nofita Sari (2018) <a href="http://journa">http://journa</a>	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksaaan Anggaran	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan hasil analisis perhitungan

	I.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA	Belanja		tingkat efisien dan efektivitas belanja terlihat pemerintah Kota Samarinda telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan tingkat efisiensi pada tahun 2011 sebesar 54,08% (Sangat Efisien), kemudian tahun 2012 sebesar 60,06% (Efisien), selanjutnya tahun 2013 tingkat efisiensi sebesar 65,79 (Efisien), lalu tahun 2014 tingkat efisiensi sebesar 64,53% (efisien, dan yang terakhir tahun 2015 tingkat efisien sebesar 62,47% (Efisien).
4	Tamasolen g (2015) Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen vol. 3 ,No. 1 2015: 97-110	Analisis efektivitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengamatan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan.
5	Immanuel Pangkey dan Sherly Pinatik (2015) Jurnal EMBA 33 Vol.3 No.4 Desember	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara	Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2010

	2015, Hal. 33-43			tingkat efektivitas 81,65% (Tidak Efektif). Kemudian di tahun selanjutnya 2011, tingkat efektivitas mengalami kenaikan menjadi 86,50% (Tidak Efektif). Selanjutnya pada tahun 2012 merupakan tahun yang tingkat efektivitasnya terendah selama kurun waktu 2010-2014 dengan tingkat efektivitas 75,20% (Tidak Efektif). Selanjutnya di tahun 2013 menjadi tahun yang tingkat efektivitasnya tertinggi selama kurun waktu 2010-2014 yaitu 88,25% (Tidak Efektif). Dan ditahun terakhir 2014 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 85,33% (Tidak Efektif).
6	Fitri Yunina (2018) Jurnal Akuntansi Muhammad iyah Edisi: juli-Desember 2018	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini yaitu rendahnya pengalokasian belanja langsung sehingga mengindikasikan kinerja Bappeda Aceh Tengah sangat efisien, dikarenakan <i>output</i> dari organisasi tersebut umumnya berbentuk perencanaan bukan dalam bentuk fisik

				pekerjaan, sehingga pengalokasian anggaran belanjanya dalam bentuk belanja langsung juga cenderung lebih kecil
7	Lailatul Nuzulah (2019) Jurnal Riset Akuntansi	Analisis Efisiensi dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Langsung Bidang TK/SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2016	Deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja langsung bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 sebesar 91,9% yang berada pada kategori efektif. Namun berbeda dengan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada tahun 2016 sebesar 95,1% yang berada pada kategori efektif. Ini disebabkan oleh adanya program belanja yang tidak direalisasikan dan beberapa program lain yang realisasinya tidak optimal sehingga tidak mencapai target. Tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja langsung bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang pada tahun 2015-2016 secara keseluruhan berada dalam kategori tidak efisien.

8	<p>Wahyu Heri Prasetyo (2020). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 1 Tahun 2020 e-ISSN: 2614 – 1930.</p>	<p>Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kota Malang Periode (2015-2019).</p>	<p>Analisis kuantitatif</p>	<p>Setelah hasil penelitian dan pembahasan diuraikan diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa penyerapan anggaran Disduk capil Kota Magelang periode 2015 – 2019 bervariasi. Selama periode 2015 sampai 2019 hanya di tahun 2018 dan 2019 yang penyerapan anggaanya efektif yaitu sebesar 90,65% di tahun 2018 serta 93,86% di tahun 2019. Namun di tahun 2017 penyerapan anggarannya kurang efektif dengan presentasi sebesar 76,91% sedangkan penyerapan anggaran ditahun 2015-2016 masuk kategori cukup efektif dengan presentase 89,96 dan 88,97, dan untuk tingkat efisien penyerapan anggaran diskucapil kota magelang periode 2015-2016 tidak efisien.</p>
9	<p>Firman Alimuddin (2019) Jurnal ilmu ekonomi ISSN ; 2622-</p>	<p>Analisi Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi</p>	<p>Deskriptif kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini pengelolaan anggaran dinas perindustrian perdagangan energy dan sumber daya mineral kabupaten</p>



	6383 volume 1 nomor 1 (2018) oktober	Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang		pinrang sudah efektif dan efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi kabupaten pinrang >100%
10	Siti Mardiyah Ulfah (2018) universitas Medan	Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada dinas perhubungan kota medan	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangannya sangat efektif dan tingkat efisiensi pengelolannya keuangan efisien.
11	Siti Sri Heni Setyowati (2019)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus di Desa Sendangsari Kecamatan Garung)	Deskriptif Kuantitatif	Nilai rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016-2018 Di Desa Sendangsari Kecamatan Garung yaitu sebesar 95,93%, yang memenuhi kriteria efektif. Sedangkan untuk tingkat efisiensinya rata-rata 93,14% dengan kategori kurang efisien.

### C. Kerangka Konseptual

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan juga untuk anggaran yang diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk dialokasikan ke program kerja yang telah

disusun. Jika dana APBN yang diberikan pemerintah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Jika semua itu dilaksanakan dengan baik, maka pengelolaan dana APBN dikatakan berhasil, dan jika gagal maka perlu dikoreksi pada pengelolaan anggarannya. Di bawah ini peneliti membuat skema kerangka pikir dalam penelitian ini.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang dikaji secara kuantitatif. Dalam hal ini dipaparkan kondisi keuangan dan posisi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Makassar, yaitu menguraikan dan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Makassar. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti ingin menguji efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan data laporan realisasi anggaran dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Makassar.

#### **B. Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan, untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang beralamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Kota Makassar. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dua (2) bulan lamanya yang dimulai pada bulan Juni-Juli 2023.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Adapun yang ditetapkan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk keperluan penelitian. Mengingat populasi dari penelitian ini sangat luas, maka penulis mengambil sampel yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yaitu data yang bersifat kuantitatif, selama tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 hingga 2021 yang diperoleh dari dokumen realisasi anggaran atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Dalam proses pengumpulan data, penulis mengadakan studi kasus dan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

## **1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik observasi ini digunakan jika penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam serta dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

## **2. Wawancara**

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber secara langsung serta mendalam terhadap pihak yang mengetahui dan bersangkutan secara langsung dalam penggunaan anggaran sehingga peneliti mendapatkan penjelasan khususnya tentang keadaan dan situasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai narasumber adalah mereka yang dianggap cakap dan mengetahui informasi yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena itu spesifikasi penelitian tidak digambarkan secara detail, melainkan akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang akan dianalisis kemudian. Wawancara dilakukan secara berkesinambungan sehingga data yang dikumpulkan benar-benar bisa menjawab pertanyaan penelitian

## **3. Studi Literatur/Dokumen**

Pengumpulan data ini diperoleh melalui pengkajian serta penelaahan terhadap catatan tertulis ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa dalam

berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, serta dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan penelitian ini berupa :

1. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan beserta stafnya yang ada kaitannya dengan penulisan ini.
  - b. Data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen serta data lainnya yang ada, khususnya terhadap masalah yang sedang diteliti.
2. Data deskriptif adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah data serta menginterpretasikan data secara kuantitatif deskriptif adalah melalui alat bantu statistik, yaitu dengan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah sekelompok teknik untuk mengukur kuatnya hubungan antara dua variabel. Analisis ini terdiri dari beberapa langkah yaitu:

### **1. Menentukan Efektivitas**

Pengukuran Efektivitas untuk mengetahui pengelolaan anggaran beberapa tahun. Halim 2014 mendefinisikan efektivitas sebagai gambaran kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real pemerintah. Tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

Dalam menganalisis tingkat dari system pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar maka di perlukan data realisasi anggaran belanja langsung dan total anggaran belanja langsung. Dimana semakin besar presentase yang di capai maka semakin besar tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi anggaran belanja langsung, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di berikan penilaian berdasarkan Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun

1996. Tentang pedoman penilaian kinerja keuangan perhitungan efektif semakin efektifitas mendekati angka 100% maka akan semakin efektif.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900- 327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel I.

**Tabel III.1**  
**Kriteria Rasio Efektivitas**

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% Ke atas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

**Sumber: Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase kurang dari 60% kriteria tidak efektif, 60%- 80% Kriteria kurang efektif, 80%- 90% kriteria cukup efektif, 90%-100% kriteria efektif, dan lebih dari 100% kriteria sangat efektif.

## 2. Menentukan Efisiensi

Untuk menganalisis tingkat efesiensi pengelolaan keuangan daerah di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungan ratio antara realisasi anggaran belanja tidak langsung dengan total anggaran belanja



tidak langsung, dimana semakin tinggi rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut. Adapun formula yang digunakan dalam perhitungan adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui perbandingan realisasi anggaran belanja tidak langsung dengan total anggaran belanja tidak langsung maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kantor Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996. Tentang pedoman penilaian kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut:

**Tabel III.2**

**Kriteria Rasio Efisiensi**

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% Ke atas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

*Sumber: Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase kurang dari 20% kriteria tidak efisien, 21%- 85% efisien, lebih dari 85% kriteria sangat efisien.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Makassar**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar memiliki tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- b. Melaksanakan dukungan teknis dalam penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang keuangan; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yaitu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran Struktural, sebagai berikut :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset.

Bagian Kesatu Kedudukan

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah.

## **2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar**

Pada umumnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan terakhir yaitu bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dasar tersebut tentunya merupakan keinginan yang ingin dilaksanakan melalui tata kelola

pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Adapun tujuan Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya serangkaian peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan yang dituju memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

- a. Pengelolaan keuangan secara tertib adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pengelolaan keuangan yang taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan keuangan daerah yang mempedomani peraturan perundang-undangan.
- c. Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Pengelolaan keuangan yang efisien merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang menekan beratkan pada pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau dengan penggunaan terhadap masukan terendah guna mencapai keluaran tertentu.

- e. Pengelolaan keuangan yang ekonomis merupakan pengelolaan keuangan daerah dimana memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f. Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- g. Pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan adalah pengelolaan keuangan yang menunjukkan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- i. Pengelolaan keuangan yang memenuhi kepatutan adalah pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

### **3. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Mewujudkan APBD yang berkualitas menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020.

b. Misi

- 1) APBD yang berkualitas adalah Menyusun Rencana Kerja Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dengan DPRD yang disusun berdasarkan fungsi, tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini audit yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

**4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Makassar**

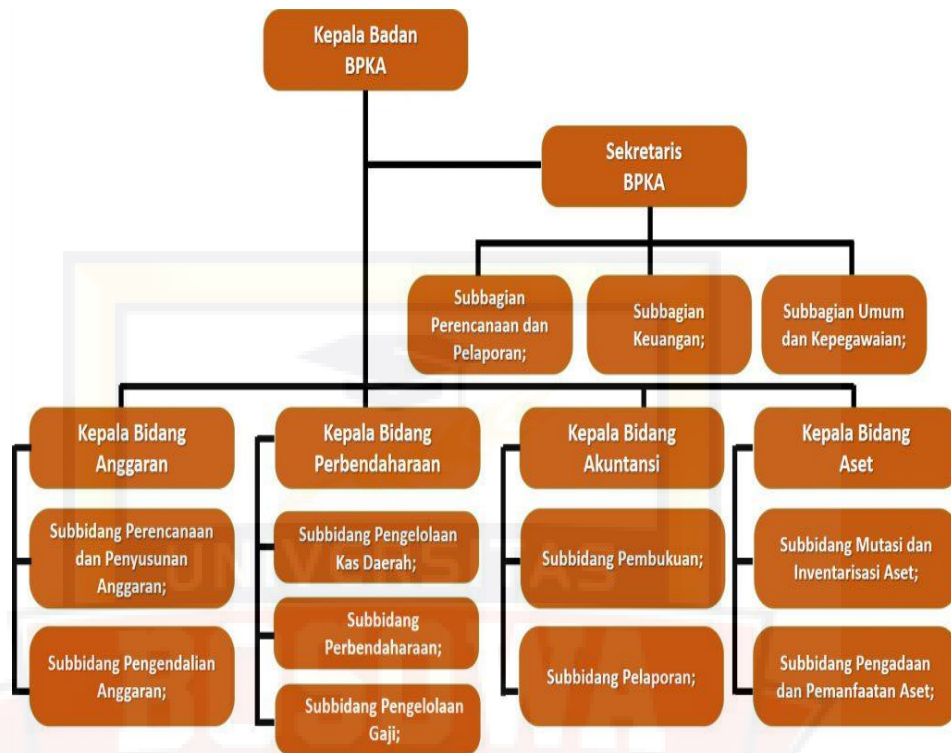
Struktur organisasi kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 3) Subbagian Keuangan
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
  - 1) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
  - 2) Subbidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
  - 1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah
  - 2) Subbidang Perbendaharaan
  - 3) Subbidang Pengelolaan Gaji
- e. Bidang Akuntansi, terdiri atas;
  - 1) Subbidang Pembukuan
  - 2) Subbidang Pelaporan
- f. Bidang Aset, terdiri atas;
  - 1) Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset
  - 2) Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset

## 5. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

### Daerah Kota Makassar



#### a. Tugas dan Fungsi

##### 1) Bagian Kepala Badan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- b) Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;



- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas:

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
- c) Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
- d) Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
- e) Mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 5 Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- f) Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
- g) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
- h) Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- i) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- j) Merumuskan dan melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k) Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l) Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian serta evaluasi administrasi keuangan Daerah;

- m) Merumuskan dan melaksanakan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah Daerah serta pengelolaan utang dan piutang Daerah;
- n) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- o) Melaksanakan inventarisasi barang Daerah dan mutasi aset;
- p) Melaksanakan pengelolaan aset/barang milik Daerah;
- q) Melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan aset/barang milik Daerah;
- r) Merumuskan kebijakan teknis pedoman pengelolaan dan penghapusan aset/barang milik Daerah;
- s) Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota;
- t) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- u) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- v) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- w) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- x) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- y) Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- z) Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional; Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis; Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- aa) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

## **2) Bagian Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c) Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan**

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**b) Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;

- 2) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**c) Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- 2) Pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

### 3) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kota. Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan operasional di bidang anggaran;
- b) Pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

#### a) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;

- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**b) Subbidang Pengendalian Anggaran**

Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengendalian anggaran, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang pengendalian anggaran;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian anggaran;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian anggaran;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**4) Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan umum Daerah, perbendaharaan belanja dan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan operasional di bidang perbendaharaan;
- b) Pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- c) Pengoordinasian kegiatan di bidang perbendaharaan;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan;



e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**a) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah**

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan verifikasi dan pengelolaan kas Daerah. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan kas Daerah;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kas Daerah;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kas Daerah;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**b) Subbidang Perbendaharaan**

Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan perbendaharaan. Subbidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**c) Subbidang Pengelolaan Gaji Pasa**

Subbidang pengelolaan gaji mempunyai tugas melakukan pengelolaan gaji. Subbidang pengelolaan gaji dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan gaji;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan gaji;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan gaji;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**5) Bidang Akuntansi**

Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas melaksanakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan operasional di bidang akuntansi;
- b) Pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi;
- c) Pengoordinasian kegiatan di bidang akuntansi;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang akuntansi;

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**a) Subbidang Pembukuan**

Subbidang Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan. Subbidang Pembukuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang pembukuan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pembukuan;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembukuan;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**b) Subbidang Pelaporan**

Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaporan keuangan. Subbidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang pelaporan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pelaporan;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pelaporan;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

## 6) Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan aset Daerah. Bidang Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan operasional di bidang aset;
- b) Pelaksanaan kegiatan di bidang aset;
- c) Pengoordinasian kegiatan di bidang aset;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang aset;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

### a) Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset

Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset mempunyai tugas melakukan pengadministrasian mutasi dan inventarisasi aset. Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang mutasi dan inventarisasi aset;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi dan inventarisasi aset;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi dan inventarisasi aset;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

### **b) Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset**

Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melakukan pemanfaatan dan pemberdayaan aset. Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan aset;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan aset;
- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan aset;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

### **B. Hasil Penelitian**

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundanganundangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan

operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2018-2022.

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, maka dapat kita lihat ringkasan laporan realisasi anggaran belanja tahun 2018, sebagai berikut :

**Tabel IV.1**

**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun 2018**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		
Belanja Pegawai	652.726.889.004,00	557.744.872.753,00
Belanja Barang dan Jasa	280.167.098.377,00	266.504.553.744,48
Bunga	70.000.000,00	60.399.553,87
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	26.708.920.750,00	24.535.022.015,00
Bantuan Sosial	820.000.000,00	474.500.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>960.492.908.131,00</b>	<b>849.319.348.066,35</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
Belanja Tanah	10.684.396.700,00	7.951.702.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	56.810.410.337,00	53.929.770.228,59
Belanja Gedung dan Bangunan	77.453.288.240,00	61.462.199.762,09
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	314.340.101.090,00	201.820.265.582,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.814.593.798,00	7.761.157.851,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>469.102.790.165,00</b>	<b>332.925.095.823,68</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>		
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	1.499.183.500,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.499.183.500,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.431.095.698.296,00</b>	<b>1.183.743.627.390,03</b>

Berdasarkan tabel diatas mengenai data Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2018, dapat kita lihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga. Jumlah belanja anggaran terbesar berada pada belanja operasi terdiri dari belanja pegawai yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp.652.726.889.004,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.557.744.872.753,00, dan bunga memiliki nilai anggaran belanja terendah sebesar Rp.70.000.000,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.60.399.553,87, serta subsidi tidak mempunyai anggaran belanja.

Belanja modal mempunyai anggaran belanja terbesar kedua terdiri dari belanja jalan, irigasi dan jaringan yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp.314.340.101.090,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.201.820.265.582,00 dan belanja aset tetap lainnya memiliki anggaran belanja terendah Rp.9.814.593.798,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 7.761.157.851,00, serta belanja aset lainnya tidak mempunyai anggaran belanja. Belanja tak terduga mempunyai anggaran belanja paling rendah di antara ketiga jenis belanja, dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp.1.500.000.000,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.499.183.500,00. Berdasarkan penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran di atas maka hasil analisis dilakukan sebagai berikut:

## a. Rasio Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas anggaran belanja tahun 2018, dimana target anggaran belanja berjumlah Rp.1.431.095.698.296,00 dengan realisasinya sebesar Rp.1.183.743.627.390,03. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 1.183.743.627.390,03}}{\text{Rp. 1.431.095.698.296,00}} \times 100\% = 82,71\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar 2018 memiliki persentase sebesar 82,71% yang menunjukkan kriteria cukup efektif.

## b. Rasio Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efisiensi anggaran belanja tahun 2018, dimana realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp.1.157.174.522.321,16 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.183.743.627.390. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 1.157.174.522.321,16}}{\text{Rp. 1.183.743.627.390}} \times 100\% = 97,75 \%$$



Perhitungan di atas menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2018 memiliki persentase sebesar 97,75% yang menunjukkan kriteria kurang efisien.

## 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, maka dapat kita lihat ringkasan laporan realisasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2019, sebagai berikut:

**Tabel IV.2**

### **Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2019**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		
Belanja Pegawai	647.965.747.369,29	596.342.285.498,00
Belanja Barang dan Jasa	336.935.248.903,60	313.165.954.329,28
Bunga	70.000.000,00	38.540.093,20
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	49.937.957.980,00	47.153.682.000,00
Bantuan Sosial	271.500.000,00	258.500.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.035.180.454.252,89</b>	<b>956.958.961.920,48</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
Belanja Tanah	9.161.374.000,00	7.612.224.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	94.338.755.643,00	86.581.079.282,49
Belanja Gedung dan Bangunan	120.122.323.797,00	95.631.609.191,91
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	267.335.211.680,00	255.547.134.789,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.781.427.040,00	6.671.293.403,24
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>498.739.092.160,00</b>	<b>452.043.341.166,64</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>		
Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	850.527.000,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>850.527.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.537.919.546.412,89</b>	<b>1.409.852.830.087,12</b>

Berdasarkan tabel diatas mengenai data Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2019, dapat kita lihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga. Jumlah belanja anggaran terbesar berada pada belanja operasi terdiri dari belanja pegawai yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp.647.965.747.369,29 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.596.342.285.498,00, dan bunga memiliki nilai anggaran belanja terendah sebesar Rp.70.000.000,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.38.540.093,20, serta subsidi tidak mempunyai anggaran belanja.

Belanja modal mempunyai anggaran belanja terbesar kedua terdiri dari belanja jalan, irigasi dan jaringan yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp. 267.335.211.680,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.255.547.134.789,00 dan belanja aset tetap lainnya memiliki anggaran belanja terendah Rp.7.781.427.040,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.671.293.403,24, serta belanja aset lainnya tidak mempunyai anggaran belanja.

Belanja tak terduga mempunyai anggaran belanja paling rendah di antara ketiga jenis belanja, dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp.4.000.000.000,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.850.527.000,00. Berdasarkan penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran di atas maka hasil analisis dilakukan sebagai berikut:

a. **Rasio Efektivitas**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas anggaran belanja tahun 2016, target anggaran belanja berjumlah Rp.1.537.919.546.412,89 dengan realisasinya sebesar Rp. 1.409.852.830.087,12. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 1.409.852.830.087,12}}{\text{Rp. 1.537.919.546.412,89}} \times 100\% = 91,67\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 memiliki persentase sebesar 91,67% yang menunjukkan kriteria efektif.

b. **Rasio Efisiensi**

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas anggaran belanja tahun 2019, realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp.1.361.551.580.993,92 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.409.852.830.087,12. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 1.361.551.580.993,92}}{\text{Rp. 1.409.852.830.087,12}} \times 100\% = 96,57\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Makassar Tahun 2019 memiliki persentase sebesar 96,57% yang menunjukkan kriteria kurang efisien.

### 3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, maka dapat kita lihat ringkasan laporan realisasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan**  
**Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2020**

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA OPERASI</b>		
Belanja Pegawai	552.395.871.702,78	540.842.389.359,00
Belanja Barang dan Jasa	372.359.795.777,00	360.168.263.635,64
Bunga	70.000.000,00	16.439.758,94
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	57.308.596.254,00	55.449.752.288,60
Bantuan Sosial	55.000.000,00	39.725.000,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>982.189.263.733,78</b>	<b>956.516.570.042,18</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
Belanja Tanah	7.995.977.000,00	6.472.251.640,00
Belanja Peralatan dan Mesin	75.362.793.392,00	73.783.098.858,99
Belanja Gedung dan Bangunan	66.819.397.527,00	65.040.309.120,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.729.443.025,00	212.275.029.805,91
Belanja Aset Tetap Lainnya	13.622.075.838,00	13.260.238.636,00
Belanja Aset Lainnya	270.000.000,00	19.999.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>388.799.686.782,00</b>	<b>370.850.927.060,90</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>		
Belanja Tak Terduga	2.790.917.235,00	1.674.586.960,90
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>2.790.917.235,00</b>	<b>1.674.586.960,90</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.373.779.867.750,78</b>	<b>1.329.042.084.063,98</b>

Berdasarkan tabel diatas mengenai data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2020, dapat kita lihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga. Jumlah belanja anggaran terbesar berada pada belanja operasi terdiri dari belanja pegawai yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp.552.395.871.702,78 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.540.842.389.359,00, dan bantuan sosial memiliki nilai anggaran belanja terendah sebesar Rp.55.000.000,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.39.725.000,00, serta subsidi dan bantuan keuangan tidak mempunyai anggaran belanja.

Belanja modal mempunyai anggaran belanja terbesar kedua terdiri dari belanja jalan, irigasi dan jaringan yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp. 224.729.443.025,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.212.275.029.805,91 dan belanja aset lainnya memiliki anggaran belanja terendah Rp.270.000.000,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.19.999.000,00. Belanja tak terduga mempunyai anggaran belanja paling rendah di antara ketiga jenis belanja, dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp.2.790.917.235,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.674.586.960,90. Berdasarkan penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran di atas maka hasil analisis dilakukan sebagai berikut:

**a. Rasio Efektivitas**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas anggaran belanja Tahun 2017, target anggaran belanja berjumlah Rp.1.373.779.867.750,78 dengan realisasinya sebesar Rp.1.329.042.084.063,98. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2017 sebagai berikut:

Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 memiliki persentase sebesar 96,74% yang menunjukkan kriteria efektif.

**b. Rasio Efisiensi**

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efisiensi anggaran belanja Tahun 2020, realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp.1.271.861.580.055,5 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.329.042.084.063,98. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 1.271.861.580.055,5}}{\text{Rp. 1.329.042.084.063,98}} \times 100\% = 95,69\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Makassar Tahun 2020 memiliki persentase sebesar 95,69% yang menunjukkan kriteria kurang efisien.

#### 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar maka dapat kita lihat ringkasan laporan realisasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel IV.4**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan**  
**Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA OPERASI</b>		
Belanja Pegawai	604.700.544.100,50	588.884.977.023,30
Belanja Barang dan Jasa	352.509.125.567,00	326.639.488.005,95
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	76.987.037.502,00	61.848.682.374,00
Bantuan Sosial	6.160.000.000,00	6.034.000.000,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.040.356.707.169,50</b>	<b>983.407.147.403,25</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
Belanja Tanah	2.235.000.000,00	2.024.699.450,00
Belanja Peralatan dan Mesin	44.553.254.601,00	41.578.959.148,22
Belanja Gedung dan Bangunan	56.056.448.650,00	49.438.813.425,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.751.824.478,00	110.854.446.191,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.119.145.512,00	9.473.481.234,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>249.715.673.241,00</b>	<b>213.370.399.448,22</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>		
Belanja Tak Terduga	2.257.951.600,00	1.924.268.244,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>2.257.951.600,00</b>	<b>1.924.268.244,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.292.330.332.010,50</b>	<b>1.198.701.815.095,47</b>

Berdasarkan tabel diatas mengenai data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2021, dapat kita lihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga. Jumlah belanja anggaran terbesar berada pada belanja operasi terdiri dari belanja pegawai yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp.604.700.544.100,50 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.588.884.977.023,30, dan bantuan sosial memiliki nilai anggaran belanja terendah sebesar Rp.6.160.000.000 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.6.034.000.000,00, serta bunga, subsidi dan bantuan keuangan tidak mempunyai anggaran belanja.

Belanja modal mempunyai anggaran belanja terbesar kedua terdiri dari belanja jalan, irigasi dan jaringan yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp. 136.751.824.478,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.110.854.446.191,00 dan belanja tanah memiliki anggaran belanja terendah Rp.2.235.000.000,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.2.024.699.450,00, serta belanja aset lainnya tidak mempunyai anggaran belanja. Belanja tak terduga mempunyai anggaran belanja paling rendah di antara ketiga jenis belanja, dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp.2.257.951.600,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.924.268.244,00. Berdasarkan penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran di atas maka hasil analisis dilakukan sebagai berikut:



## a. Rasio Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas anggaran belanja tahun 2021, target anggaran belanja berjumlah Rp.1.292.330.332.010,50 dengan realisasinya sebesar Rp.1.198.701.815.095,47. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2021 sebagai berikut:

Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2021 memiliki persentase sebesar 92,75% yang menunjukkan kriteria efektif.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 1.198.701.815.095,47}}{\text{Rp. 1.292.330.332.010,50}} \times 100\% = 92,75\%$$

## b. Rasio Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efisiensi anggaran belanja tahun 2021, realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp.1.131.894.864.517,4 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.198.701.815.095,47. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 1.131.894.864.517,4}}{\text{Rp. 1.198.701.815.095,47}} \times 100\% = 94,42\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2021 memiliki persentase sebesar 94,41% yang menunjukkan kriteria kurang efisien.

## 5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, maka dapat kita lihat ringkasan laporan realisasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Operasi</b>		
Belanja Pegawai	627.139.021.439,59	612.418.860.600,00
Belanja Barang dan Jasa	330.007.487.241,00	307.347.280.366,87
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	35.012.964.564,00	33.180.634.494,00
Bantuan Sosial	3.901.666.704,54	3.600.156.080,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>996.061.139.949,13</b>	<b>956.546.931.540,87</b>
<b>Belanja Modal</b>		
Belanja Tanah	1.204.000.000,00	1.137.691.750,00
Belanja Peralatan dan Mesin	51.409.356.061,00	53.143.236.699,70
Belanja Gedung dan Bangunan	55.481.641.425,00	52.233.776.991,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	204.716.299.514,00	268.021.270.858,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	13.625.128.941,00	10.496.182.613,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>326.436.425.941,00</b>	<b>385.032.158.912,69</b>
<b>Belanja Tak Terduga</b>		
Belanja Tak Terduga	1.558.951.600,00	1.478.283.048,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>1.558.951.600,00</b>	<b>1.478.283.048,00</b>

<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.324.056.517.490,13</b>	<b>1.343.057.373.501,56</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Berdasarkan tabel diatas mengenai data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2022, dapat kita lihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga. Jumlah belanja anggaran terbesar berada pada belanja operasi terdiri dari belanja pegawai yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp.627.139.021.439,59 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.612.418.860.600,00, dan bantuan sosial memiliki nilai anggaran belanja terendah sebesar Rp.3.901.666.704,54 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.3.600.156.060,00, serta bunga, subsidi dan bantuan keuangan tidak mempunyai anggaran belanja.

Belanja modal mempunyai anggaran belanja terbesar kedua terdiri dari belanja jalan, irigasi dan jaringan yang memiliki nilai anggaran belanja tertinggi sebesar Rp. 204.716.299.514,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.268.021.270.858,99 dan modal tanah memiliki anggaran belanja terendah Rp.1.204.000.000,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.137.691.750,00, serta belanja aset lainnya tidak mempunyai anggaran belanja. Belanja tak terduga mempunyai anggaran belanja paling rendah di antara ketiga jenis belanja, dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp.1.558.951.600,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.478.283.048,00. Berdasarkan penjelasan mengenai

laporan realisasi anggaran di atas maka hasil analisis dilakukan sebagai berikut:

**a. Rasio Efektivitas**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan rasio efektivitas anggaran belanja Tahun 2022, target anggaran belanja berjumlah Rp.1.324.056.517.490,13 dengan realisasinya sebesar Rp.1.343.057.373.501,56. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 1.343.057.373.501,56}}{\text{Rp. 1.324.056.517.490,13}} \times 100\% = 101,43\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2022 memiliki persentase sebesar 101,43% yang menunjukkan kriteria sangat efektif.

**b. Rasio Efisiensi**

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efisiensi anggaran belanja Tahun 2019, realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp.1.304.798.299.879,5 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.343.057.373.501,56. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 1.304.798.299.879,5}}{\text{Rp. 1.343.057.373.501,56}} \times 100\% = 97,15\%$$

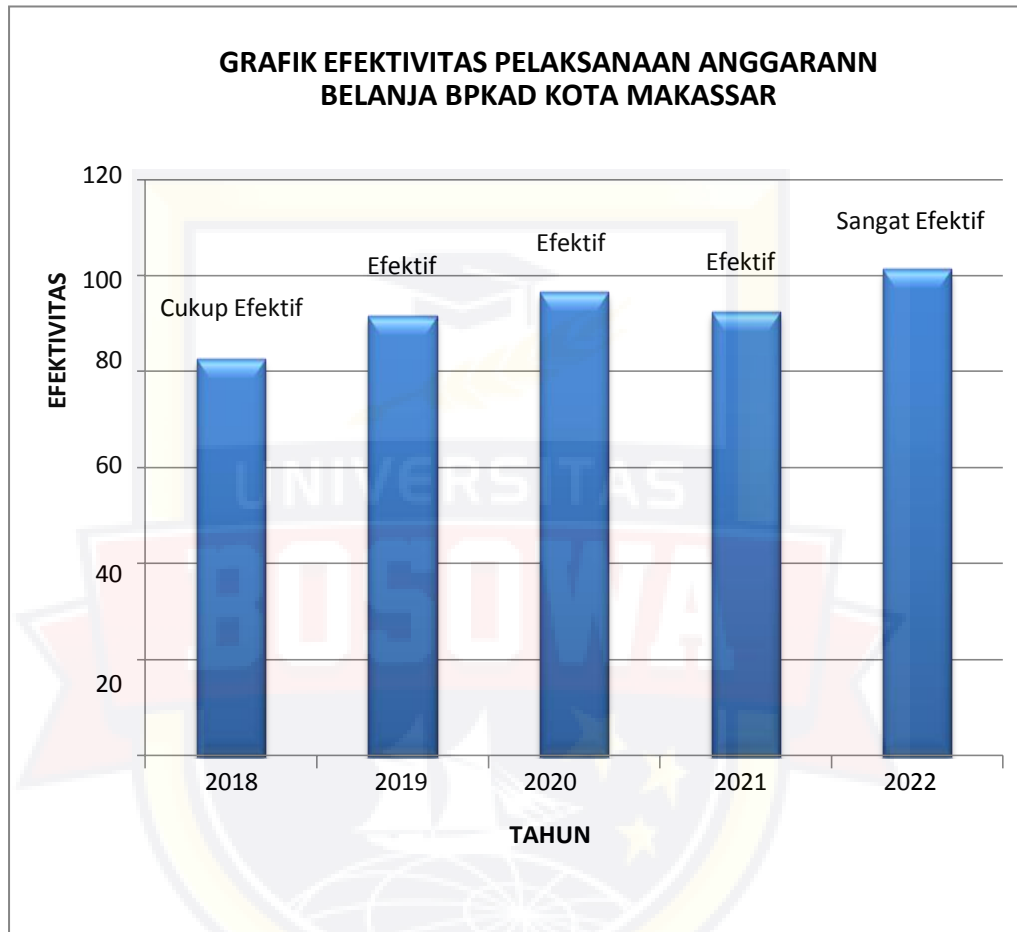
Perhitungan di atas menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2022 memiliki persentase sebesar 97,15% yang menunjukkan kriteria kurang efisien.

**Tabel IV.6**  
**Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan**  
**Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar 2022**

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2018	1.431.095.698.296	1.183.743.627.390	82,71	Cukup Efektif
2019	1.537.919.546.412	1.409.852.830.087	91,67	Efektif
2020	1.373.779.867.750	1.329.042.084.063	96,74	Efektif
2021	1.292.330.332.010	1.198.701.815.095	92,75	Efektif
2022	1.324.056.517.490	1.343.057.373.501	101,43	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat kita lihat bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018-2022 selalu mengalami peningkatan persentase dan perubahan kriteria efektivitas dari cukup efektif menjadi sangat efektif. Dimana pada tahun 2018 kriterianya cukup efektif, tahun 2019, 2020 dan 2021 kriterianya efektif dan tahun 2022 kriteria efektivitasnya menjadi sangat efektif. Untuk penjelasan lebih detail dapat kita lihat grafik serta penjelasan di bawah ini:

Grafik I  
Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Makassar



Berdasarkan grafik batang diatas analisis efektivitas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 82,71% (Cukup Efektif), hal ini terjadi karena adanya belanja yang realisasinya hanya sebesar 57,87% jauh sedikit dibandingkan dengan target. Anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.820.000.000 dengan realisasi hanya sebesar Rp.474.500.000 selain itu belanja jalan, irigasi, dan jaringan juga

ter-realisis hanya sebesar 64,20% dari anggaran Rp.314.340.101.090 realisasi Rp.201.820.265.582.

Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 91,67% (Efektif). hal ini terjadi karena adanya belanja yang realisasinya hanya sebesar 55,06% jauh sedikit dibandingkan dengan target. Anggaran belanja bunga sebesar Rp.70.000.000 dengan realisasi hanya sebesar Rp.38.540.093,20 selain itu belanja tak terduga juga ter-realisis hanya sebesar 21,26% dari anggaran Rp.4.000.000.000 dengan realisasi Rp.850.527.000.

Tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 96,74% (Efektif) meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2017 terdapat anggaran yang ter-realisasikan hanya sebesar 7,41% yaitu belanja modal aset lainnya dengan target Rp.270.000.000 realisasi hanya Rp.19.999.000. Belanja bunga yang ter-realisis hanya sebesar 23,49% dari target anggaran Rp.70.000.000 realisasi Rp.16.439.758,94. Serta terdapat juga belanja tak terduga yang terrealisasi 60% dari target anggaran Rp.2.790.917.235 realisasi Rp.1.674.586.960,90.

Tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 92,75% (Efektif). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan nilai persentase efektivitas tetapi kriteria nya tetap sama, hal ini disebabkan karena adanya anggaran belanja ditahun 2020 yang tidak ditargetkan ditahun 2021, yaitu belanja bunga dan belanja modal aset lainnya.

Tahun 2022 tingkat efektivitas sebesar 101,43% (Sangat Efektif) pada tahun ini mengalami peningkatan efektivitas yang sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya, ditahun ini realisasi anggaran tinggi dibandingkan target anggaran adalah modal peralatan dan mesin dengan tingkat realisasi sebesar 103,37% dari anggaran Rp.51.409.356.061 realisasi Rp.53.143.236.699 dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ter-realisasi 130,93% dari anggaran sebesar Rp.204.716.299.514 realisasi sebesar Rp.268.021.270.858,99.

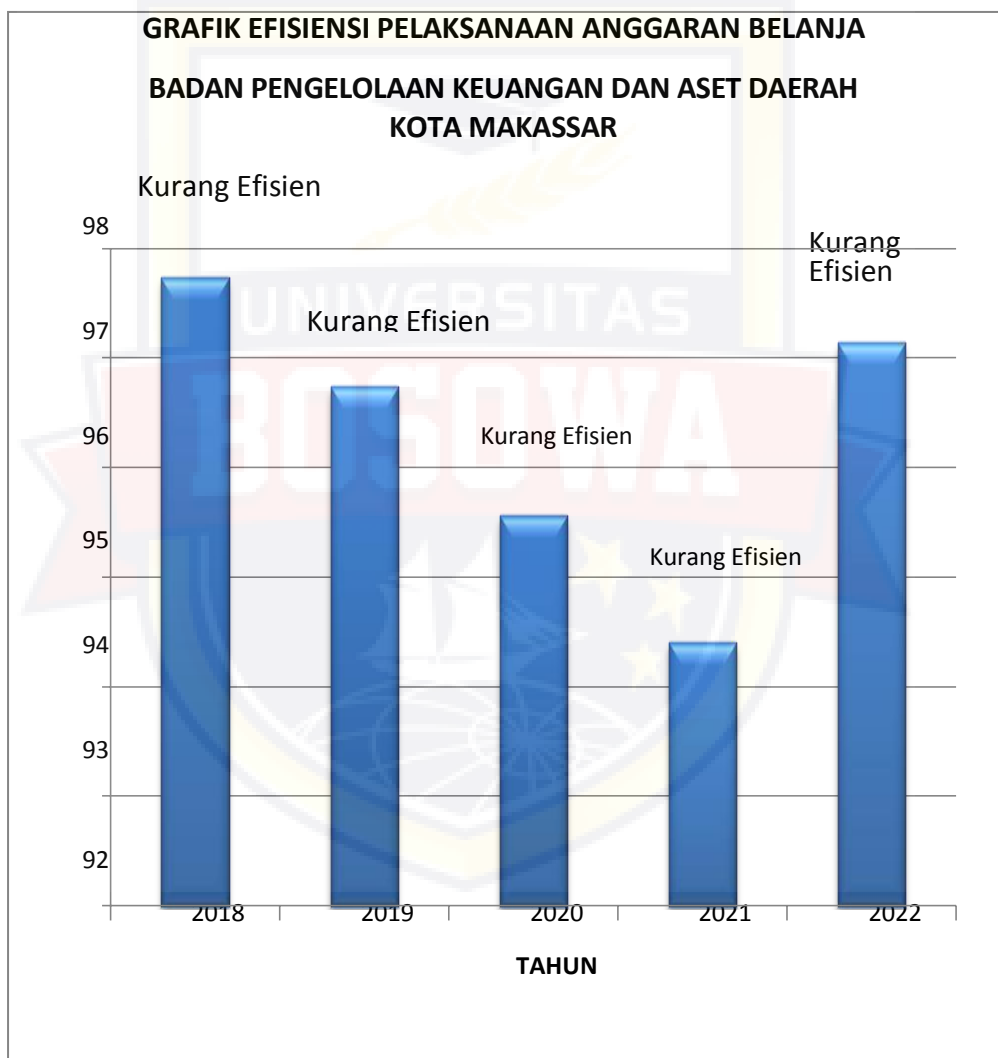
**Tabel IV.7**  
**Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
2018	1.157.174.522.321,16	1.183.743.627.390,03	97,75	Kurang Efisien
2019	1.361.551.580.993,92	1.409.852.830.087,12	96,57	Kurang Efisien
2020	1.271.861.580.055,50	1.329.042.084.063,98	95,69	Kurang Efisien
2021	1.131.894.864.517,40	1.198.701.815.095,47	94,42	Kurang Efisien
2022	1.304.798.299.879,50	1.343.057.373.501,56	97,15	Kurang Efisien

Berdasarkan tabel IV.7 di atas dapat kita lihat bahwa efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018- 2022 tidak mengalami perubahan yang baik tiap tahunnya, dimana kriteria efisiensinya selalu sama tiap tahunnya yaitu kurang efisien. Untuk penjelasan lebih detail dapat kita lihat grafik serta penjelasan di bawah ini:



Grafik II  
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Kota Makassar



Berdasarkan tabel dan grafik batang diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan

penurunan persentase tetapi memiliki kriteria yang sama. Tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 97,75% (Kurang Efisien), hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 85,45% dengan realisasi sebesar Rp.557.744.872.753, belanja barang dan jasa memiliki persentase 95,12% dengan realisasi sebesar Rp.266.504.553.744,48 dan belanja modal memiliki persentase 70,97% dengan realisasi sebesar Rp. 332.925.095.823,68.

Tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 96,57% (Kurang Efisien) meskipun persentase-nya menurun dari tahun sebelumnya tetapi penggunaan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun ini memiliki persentase yang tinggi, hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 92,03% dengan realisasi sebesar Rp.596.342.285.498, belanja barang dan jasa memiliki persentase 92,95% dengan realisasi sebesar Rp.313.165.954.329,28 dan belanja modal memiliki persentase 90,64% dengan realisasi sebesar Rp.452.043.341.166,64.

Tahun 2020 tingkat efisiensi sebesar 95,69% (Kurang Efisien) sama seperti tahun sebelumnya yang mengalami penurunan persentase efisiensi tetapi mengalami peningkatan persentase penggunaan realisasi anggaran belanja langsung, hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 97,91% dengan realisasi sebesar Rp.540.842.389.359, belanja barang dan jasa memiliki persentase 96,73% dengan realisasi Rp.360.168.263.635,64 dan

belanja modal memiliki persentase 95,38% dengan realisasi sebesar Rp.370.850.927.060,90.

Tahun 2021 tingkat efisiensi sebesar 94,42% (Kurang Efisien), hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 97,38% dengan realisasi sebesar Rp.588.884.977.023,30, belanja barang dan jasa memiliki persentase 92,66% dengan realisasi sebesar Rp.326.639.488.005,95 dan belanja modal memiliki persentase 85,45% dengan realisasi sebesar Rp.213.370.399.448,22.

Tahun 2022 tingkat efisiensi sebesar 97,15% (Kurang Efisien) pada tahun ini mengalami peningkatan persentase efisiensi dari tahun sebelumnya serta mengalami peningkatan penggunaan realisasi anggaran belanja langsung, hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 97,65% dengan realisasi sebesar Rp.612.418.860.600, belanja barang dan jasa memiliki persentase 93,13% dengan realisasi sebesar Rp.307.347.280.366,27 dan belanja modal memiliki persentase 117,95% dengan realisasi sebesar Rp.385.032.158.912,69. Sehingga analisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja periode 2015-2019 masuk dalam kriteria kurang efisien karena dari belanja langsung ini dapat mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja menjadi kurang efisien jika penggunaan realisasi anggaran belanja langsung begitu besar.

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018-2022 selalu mengalami perubahan nilai persentase. Pada tahun 2018 persentase efektivitas anggaran belanja sebesar 82,71% (Cukup Efektif), selanjutnya tahun 2019, 2020 dan 2021 memiliki persentase efektivitas anggaran belanja diatas 90% yang di keriteriakan efektif yaitu pada tahun 2019 memiliki persentase sebesar 91,67%(Efektif), tahun 2020 memiliki persentase sebesar 96,74% (Efektif), serta pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 92,75% (Efektif), walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai persentase dari tahun sebelumnya, tetapi tetap di kriteriakan efektif, dan pada tahun 2022 memiliki peningkatan persentase efektivitas anggaran belanja sebesar 101,43% (Sangat Efektif). Hal yang menyebabkan analisis efektivitas ini cukup efektif hingga sangat efektif karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai akan memengaruhi kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Jika realisasi anggaran belanja lebih tinggi

dibandingkan dengan target anggaran belanja, maka semakin efektif pelaksanaan belanja anggaran.

## **2. Analisis efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018-2022 mengalami perubahan persentase setiap tahunnya namun memiliki kriteria efisiensi yang sama. Di mana pada tahun 2018 persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 97,75% (kurang efisien), tahun 2019 persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 95,57% (kurang efisien), tahun 2020 persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 95,69% (kurang efisien), dan tahun 2021 persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 94,42%. Meskipun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami penurunan nilai persentase efisiensi anggaran belanja, namun tidak mengalami perubahan dalam kriteria efisiensi. Serta pada tahun 2022 mengalami peningkatan nilai persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 97,15% (kurang efisien). Hal yang menyebabkan analisis efisiensi ini kurang efisien selama 5 (lima) tahun berturut-turut karena realisasi anggaran belanja langsung dapat mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja menjadi kurang efisien jika penggunaan realisasi anggaran belanja langsung begitu besar, di mana pada tahun 2018 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan

realisasi anggaran sebesar 85,45%, dan belanja barang dan jasa sebesar 95,12%. Tahun 2019 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan realisasi anggaran sebesar 92,03%, dan belanja modal sebesar 90,64%.

Tahun 2020 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan realisasi anggaran sebesar 97,91% dan belanja barang dan jasa sebesar 96,73%. Pada tahun 2021 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan realisasi anggaran sebesar 97,38% dan belanja barang dan jasa sebesar 92,66%. Serta pada tahun 2022 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan realisasi anggaran sebesar 97,65% dan belanja modal sebesar 117,95%. Jika dilihat dari penggunaan realisasi anggaran belanja langsung tiap tahunnya, realisasi anggaran belanja pegawai dan realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang lebih dominan mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar. Pengelolaan anggaran belanja ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, dapat di lihat dari hasil pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

Tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar pada tahun 2018-2022 mempunyai kriteria efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2022 dan yang terendah terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 kriteria efektivitas nya cukup efektif, pada tahun 2019, 2020, 2021 kriteria efektivitas nya efektif dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kriteria efektivitas yang sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif

Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2018-2022, secara keseluruhan belum dikelola secara baik. Di mana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2018-

2022 kriteria nya kurang efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

## **B. Saran**

Menilai dari segi efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar agar mempertahankan tingkat efektivitas yang tiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat baik di mana tingkat kriteria dari cukup efektif menjadi kriteria yang sangat efektif, untuk tingkat efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar agar lebih meningkatkan tingkat efisiensi pada tahun yang akan datang dengan melakukan penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abraca 2021  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1460/8/UNIKOM\\_MELANIA%20DILSANITA%20AMARAL\\_21112051\\_BAB%20III%20PELAKSANAAN%20KERJA%20PRAKTEK.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1460/8/UNIKOM_MELANIA%20DILSANITA%20AMARAL_21112051_BAB%20III%20PELAKSANAAN%20KERJA%20PRAKTEK.pdf) 9 (Diakses tanggal 2 Februari 2023)
- Ernawijaya (2015) <http://eprints.umpo.ac.id/3991/3/BAB%20II.pdf>
- Fauziah, Ifat. (2018). Standar Akuntansi Pemerintahan. Cetakan Pertama. Ilmu. - Jakarta.
- Halim dan Kusufi (2016)  
[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/iogi2018,+02.+Virginia+Pongoh.+OK%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/iogi2018,+02.+Virginia+Pongoh.+OK%20(1).pdf)
- Halim Abdul.2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat salemba.
- Haryanto, dkk (2007) [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12430-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12430-Full_Text.pdf)
- Herispon (2015) [https://www.researchgate.net/profile/Herispon-Herispon-2/publication/326414055\\_ANGGARAN\\_PERUSAHAAN/links/5b4c3a2945851519b4c02b70/ANGGARAN-PERUSAHAAN.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Herispon-Herispon-2/publication/326414055_ANGGARAN_PERUSAHAAN/links/5b4c3a2945851519b4c02b70/ANGGARAN-PERUSAHAAN.pdf) . (Diakses tanggal 2 Februari 2023)
- Indra ( 2006 ) [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12430-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12430-Full_Text.pdf)
- Lubis 2011  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/308/8/UNIKOM\\_Anggita%20Regi%20Virdiana\\_13.BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/308/8/UNIKOM_Anggita%20Regi%20Virdiana_13.BAB%20II.pdf) (Diakses tanggal 5 Februari 2023)
- Mulyadi (2015)  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/308/8/UNIKOM\\_Anggita%20Regi%20Virdiana\\_13.BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/308/8/UNIKOM_Anggita%20Regi%20Virdiana_13.BAB%20II.pdf)
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. C.V Andi offset. Yogyakarta.

Mardiasmo 2018

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/iogi2018,+01+ANTONY+OK.pdf>

Menurut Trianto (2016)

[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/iogi2018,+Erika+Z.+Lasupu.+OK%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/iogi2018,+Erika+Z.+Lasupu.+OK%20(1).pdf)

Rondonuwu, Ritno H. (2011). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Minahasa. Jurnal EMBA 3(4) 001-

142. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10580/10167>

Sasongko 2010

<https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/hNwgQqaIA74MkvuecBJzVCKSpPXY85mlfdFx9tby1sOro3LGU.pdf>

(Diakses tanggal 5 Februari 2023)

Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Ulum, Ihyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. UMM Press. Malang

Yunina, F. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 9(1), 74–81.

<https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>

Yunina, F., & Jumiati. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah. 9(1), 1–12.

Waney, C.K., D.P.E. Saerang dan S.W. Alexander. (2018). Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concert 13(2): 334-341.

Waney et al., 2018 [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/cdatu,+Artikel%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/cdatu,+Artikel%20(1).pdf)

### **Sumber Internet:**

[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14067-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14067-Full_Text.pdf) (Diakses tanggal 2 Februari 2023)

[https://www.researchgate.net/publication/326414055\\_ANGGARAN\\_PERUSAHAAN](https://www.researchgate.net/publication/326414055_ANGGARAN_PERUSAHAAN) (Diakses tanggal 2 Februari 2023)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

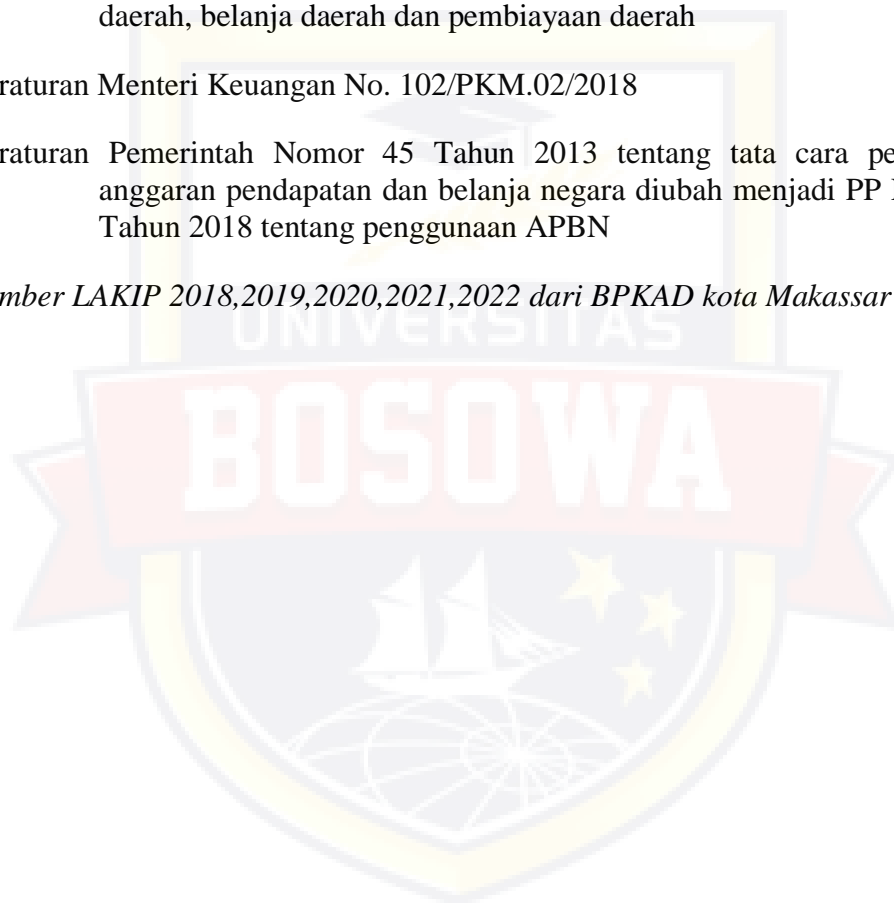
PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/50TAHUN2018PP.pdf>

Permendagri No.52 Tahun 2016 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PKM.02/2018

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diubah menjadi PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggunaan APBN

*Sumber LAKIP 2018,2019,2020,2021,2022 dari BPKAD kota Makassar*



## LAMPIRAN



